

# Perbandingan tanggung jawab penyelenggara peer-to-peer lending di Indonesia, Inggris, dan India = Comparative analysis of peer-to-peer lending platform's liability in Indonesia, UK, and India

Mian Ulisakti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20485219&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

<p style="text-align: justify;">Teknologi finansial sedang berkembang beberapa tahun belakangan, termasuk di Indonesia, yang juga telah meregulasi sektor jasa keuangan ini. Salah satu jenis teknologi finansial tersebut adalah layanan <em>&shy;peer-to-peer lending</em>, yakni skema pemberian pinjaman yang &nbsp;mengantikan peran bank konvensional sebagai lembaga perantara. Kendati demikian, jasa keuangan ini memiliki risiko seperti gagal bayar dan berhentinya kegiatan usaha penyelenggara. Meskipun angka <em>non-performing loan peer-to-peer lending</em> di Indonesia masih terbilang kecil, namun tetap menunjukkan peningkatan. Skripsi ini merupakan penelitian untuk meninjau dan memperbandingkan pengaturan tanggung jawab penyelenggara <em>peer-to-peer lending </em>di Indonesia dengan Inggris dan India dalam hal penerima pinjaman wanprestasi, dan dalam hal penyelenggara berhenti melakukan kegiatan usaha. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif studi perbandingan hukum, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan didukung hasil wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan ketiga negara tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengatur tanggung jawab penyelenggara. Terdapat perbedaan, yakni dalam mengatur dasar tindakan penagihan utang, keterbukaan informasi, jaminan, tanggung jawab dalam hal penerima pinjaman wanprestasi, dan prosedur dalam hal kegiatan usaha berhenti. Setelah melakukan perbandingan, ditemukan bahwa pemerintah Indonesia harus mengadakan perubahan terhadap peraturan yang ada saat ini untuk memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab penyelenggara dalam hal penerima pinjaman wanprestasi maupun dalam hal penyelenggara berhenti beroperasi.</p><hr /><p style="text-align: justify;">Financial Technology is emerging in the past several years, including in Indonesia, which also has regulated this financial service sector. One of the financial technology is peer-to-peer lending, a lending scheme which replace the role of conventional bank as an intermediary. However, this financial service has potential risk such as default or the closure of business operation. Although the number of non-performing loan is relatively small, it increases. This thesis is a study to review and compare peer-to-peer lending's platform liability in Indonesia against those in UK and India in case of borrowers' default and in case of platform ceases to do its business activity. The method used in this thesis is juridical normative comparative analysis, by conducting research to library materials or secondary data, and supported by interview with informants. The research result indicates the three countries have similarities and differences in regulating platform's liability. There are differences in the provisions regarding debt collection, information disclosure, mortgage, platform's liability India in case of borrowers' default, and procedure in case of platform ceases to do its business activity. After making the relevant comparison, it is found that Indonesian government needs to amend current regulation to provide provision on platform's liability, both ex-ante and ex-post, in case of borrowers' default and in case of platform ceases to operate.</p>